

# KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

**Faried Potabuga**

*parif.asus2015@gmail.com*

*Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*The aim of this research was to determine the performance Sigi Regency Organizing Elections In the DPR, DPD, and DPRD 2014. In order to measure performance in this study using performance theory put forward by Dwiyanto, include: productivity, quality of service, responsiveness, responsibility, and accountability this research is classified as descriptive, qualitative approach. This study is also the Ex Post Facto research. The study involved a total of 12 (twelve) informant determined purposive. Data is collected using interview techniques and documentation. Analysis of the data in this study include data reduction, data presentation, and Draw conclusions. The results of these studies show performance Election Commission Sigi In the General Election of DPR, DPD and DPRD 2014, if in view of the elements of optimal productivity is already done, the elements are already optimally implemented Responsibility, Accountability elements are already optimally implemented. While the element is not optimal Quality of Service and responsiveness element.*

**Keywords:** *Productivity, Quality of Service, Responsiveness, Responsibility, and Accountability*

Penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 E ayat 5, Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum terdiri dari komisioner KPU dibantu oleh Sekretariat jendral KPU. KPU juga melaksanakan pendidikan pemilihan dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dalam rangka memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, secara baik tanpa menimbulkan permasalahan, menjadi ukuran kinerja

Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kinerja sebagai kuantitas dan kualitas pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi. Lebih jauh dikatakan bahwa kinerja dapat diukur baik secara individu, kelompok ataupun organisasi. Tinggi atau rendahnya kinerja ini dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas pencapaian tugasnya. Aspek kualitas ini mengacu pada beban kerja yang telah ditetapkan sedangkan kualitas kerja dapat dilihat dari rapi atau tidaknya pekerjaannya yang telah dilaksanakan. (Schermerhorn, Hunt and Osborn dalam Veithzal Rivai, 2005:15).

Mengacu pada pendapat Dwiyanto (2002:48-49), indikator kinerja terdiri dari: produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Berkaitan dengan penelitian ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilihan umum tidak terhambat bahkan

menimbulkan permasalahan hanya disebabkan tidak tersedianya data pemilih tetap yang valid. Tugas tersebut merupakan bagian dari tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk kelancaran jadwal terselenggaranya pemilu, maka proses administrasi pemutakhiran data pemilih sangat penting. Masih tidak validnya data pemilih ini mencitrakan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi masih belum mencapai harapan yang diinginkan masyarakat. Pemutakhiran data diperlukan untuk menjamin hak pilih setiap warga negara dapat tersalurkan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan umum secara langsung anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2014 di Kabupaten Sigi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dihadapkan dengan permasalahan yang serius, salah satunya adalah masih terdapat data pemilih yang tidak valid, hal ini dapat dilihat dengan masih adanya penduduk yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk namun belum terdaftar dalam Data Pemilih Tetap (DPT), malahan sebaliknya warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk sudah terdata dalam Daftar Pemilih, begitu juga dengan penduduk yang sudah meninggal dan penduduk yang sudah tidak berdomisili di Kabupaten Sigi masih terdata dalam daftar pemilih tetap, hal tersebut menjelaskan bahwa kurangnya produktivitas yang dimiliki KPUD Sigi.

Pada saat diumumkan nama-nama pemilih/wajib pilih tetap di setiap Desa/Kelurahan, sebagian penduduk mengklaim dirinya tidak terdaftar sebagai wajib pilih sementara ada nama pemilih yang sudah meninggal justru masih tercantum namanya dalam daftar pemilih tetap. Hal tersebut menunjukkan rendahnya kualitas layanan, dan responsivitas. Permasalahan tersebut menjadi tanggungjawab Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sigi untuk diselesaikan sebelum menyelenggarakan Pemilihan Umum. Dari informasi yang diperoleh diketahui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPT) pemilihan legislatif tahun 2014 berjumlah 165.423, NIK invalid berjumlah 17.163. Perubahan pertama total 13.676, perubahan ke dua total 4.200. Data ganda pada Daftar Pemilih (DP) berjumlah 8000, pada Daftar pemilih Sementara (DPS) terdapat 120 data ganda, pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat 18 data ganda, pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) terdapat 69 data ganda, dan Daftar Pemilihan Khusus Tambahan terdapat 21 data ganda.

Permasalahan Ketersediaan data pemilih/wajib pilih tetap yang valid pada setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, selalu menjadi permasalahan utama yang muncul karena pemilih/wajib pilih yang tidak sesuai dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Permasalahan tersebut sebagai akibat tidak maksimalnya kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi, dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih.

Permasalahan lain yang terjadi adalah minimnya sosialisasi menyangkut tata cara pelaksanaan pemilihan umum, anggota DPD, DPRD, dan DPR, dan tentang pentingnya partisipasi warga dalam kehidupan demokrasi sehingga penduduk wajib pilih kurang memahami bagaimana menggunakan hak pilihnya. Hal itu pula menunjukkan rendahnya responsibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi, karena dalam proses administrasi belum didasarkan pada pelaksanaan kegiatan organisasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijakan organisasi. Demikian pula kinerja akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, belum maksimal menjawab dan menjelaskan kepada masyarakat yang memiliki hak pilih, dengan demikian masih terdapat wajib pilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pemilihan

umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, pada tahun 2014 di Kabupaten Sigi.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, yang memberikan gambaran bahwa kinerja komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi dinilai masih rendah. Hal tersebut menggambarkan belum maksimalnya tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014. Oleh karena itu peneliti berkeinginan menelusurinya dan mengkonfirmasi menggunakan teori Kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2002:48-49), meliputi Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Guna memperoleh gambaran yang obyektif tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, pada tahun 2014.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kinerja KPUD Sigi Pada Penyelenggaraan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2014.?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja KPUD Sigi Pada Penyelenggaraan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2014.

## **METODE**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Nawawi (2008:75) mengungkapkan bahwa Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek yang diteliti seperti individu, lembaga, masyarakat dan lain-lain, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Dari segi pendekatannya penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif. John W Creswel dalam Patilima (2007:2) mendefenisikan sebagai berikut : pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Penelitian ini juga merupakan penelitian *Ex Post Facto*. Menurut Sugiyono (2010:7), penelitian *Ex Post Facto* adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejadian tersbut.

Penelitian ini bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, dimulai setelah dilaksanakannya seminar usulan penelitian dan telah mendapatkan surat izin penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive*, yaitu teknik pemilihan informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (sugiyono, 2010:216).

Informan dalam penelitian sebanyak 12 orang, yaitu : 5 Oranga Komisioner KPUD Sigi, Sekretaris KPUD Sigi, 4 Orang Kepala Sub Bagian Sekretariat KPUD Sigi, 1 Orang Panwas Kabupaten Pada Pileg Tahun 2014, dan 1 Orang Masyarakat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data terukur yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*depth interview*) dengan informan penelitian untuk mengungkap Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi pada penyelenggaraan pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Data primer dan Data sekunder.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik Wawancara (*interview*) dan

Dokumentasi. Dalam Penelitian ini peneliti adalah instrument dari penelitian itu sendiri, yang didukung pedoman wawancara mendalam (*interview guide*). Data dalam penelitian ini di analisis menggunakan model yang dikemukakan oleh Menurut Miles dan Huberman, (1994:10-12), yaitu meliputi : Pengumpulan Data, Reduksi data, Penyajian data, dan Menarik kesimpulan (*Verifikasi*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum

Visi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Komisi Pemilihan Umum selama 5 ( Lima) tahun yaitu 2010-2014 adalah : “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokraasi indonesia yang berkualitas berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik indonesia”.

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasara dalam penyelenggaraan pemilu yaitu ; Integritas, Profesional, Mandiri Transparan, dan Akuntabel. Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komrehensif tentang Visi Komisi Pemilihan Umum. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemilu yang Berintegritas : Penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan.
2. Pemilu yang Profesional : Penyelenggara pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam penyelenggaraan pemilu,

3. Pemilu yang Mandiri : Penyelenggaraan pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
4. Pemilu yang transparan : Penyelenggaraan pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya.
5. Pemilu yang Akuntabel : Penyelenggaraan pemilu yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaanya dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum dalam memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*Care Competency*) yaitu penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan demokrasi.

Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka Komisi Pemilihan umum telah menyusun Misi. Visi dan Misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama kurun waktu 2010-2014. Adapun Misi Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Membangun lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu.
- b. Menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Presiden dan wakil Presiden serta Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah secara langsung, umum, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang bersih, efisien, dan efektif.
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu secara adil dan setara serta menegakkan peraturan pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu

demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

### **Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.**

Berdasar Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu, Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi :

- 1) Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD
- 2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- 3) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Sigi melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sigi yang hirarkisnya dibawah KPU Provinsi, KPU Pusat dalam satu kesatuan manajemen.

Sekretariat KPU Kabupaten Sigi memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu.
2. Memberikan dukungan teknis administrasi.
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam penyelenggaraan Pemilu.
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah Provinsi dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU
6. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu.
7. Membantu penyusunan laporan penyusunan penyelenggaraan kegiatan pertanggungjawaban KPU.
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

Dalam menyelesaikan tugas sebagaimana tersebut diatas, sekretariat KPU

Kabupaten Sigi menyelenggarakan fungsi untuk:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu.
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan pemilu.
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan pemilu di tingkat kabupaten.
4. Membantu perumusan dan penyusunan rencana keputusan KPU tingkat Kabupaten/Kota
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten Sigi.
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sigi.
7. Membantu pengelolaan data dan informasi.
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan pemilu di Kabupaten.
9. Membantu penyusunan kerjasama antara lembaga di tingkat Kabupaten/Kota.
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan pemilu dan pertanggungjawaban KPU.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat KPU Kab. Sigi, berwenang untuk:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu kepala dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten berdasarkan norma, standar prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan KPU
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten Sigi
4. Memberikan layanan Administrasi ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Sigi dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk :

1. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan.
2. Memelihara arsip dan dokumen pemilu.
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sigi

### **Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.**

Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi periode 2010-2013 berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah N0.17kpts/kpu-Prov-024/2014 tanggal 18 Januari 2014. Atas dasar surat tersebut diatas terjadi perubahan struktur kepemimpinan berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah N0.22/kpts/kpu-Prov-024/2014 tanggal 20 Januari 2014 adalah sebagai berikut :

1. Taufik Lasenggo, S.Sos, M.Si : Ketua KPU Kab. Sigi
2. Moh. Syarif Latadano, SP : Anggota
3. Muh. Nuzul Lapali, SH : Anggota
4. Hidayat, S.Pd : Anggota
5. Max Mokodompis, SP : Anggota

Berdasarkan surat di terbitkan Ketua KPU mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 tahun 2008 tentang Struktur organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2010. Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administrasi, termasuk pengelolaan anggaran pemilu. Dengan demikian KPU Kabupaten Sigi dibantu oleh

Sekretariat KPU dengan struktur sebagai berikut :

1. Anwar, S.Sos, MM : Sekretaris KPU Kabupaten Sigi
2. Drs. Faried Potabuga : Kasubag Program dan Data
3. Ardin, S.Sos : Kasubag Teknis Pemilu dan HUPMAS
4. Suyudin, SH : Kasubag Hukum
5. Ilham Lahaua, S.Sos : Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik

### **Produktivitas**

Produktivitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014, dari tanggapa yang dikemukakan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, dapat dikatakan bahwa kinerja KPU Kabupaten Sigi dalam penyelenggara Pileg Tahun 2014 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan sehingga produktifitas dari sudut pandang Komisioner berkaitan penyelenggaraan pileg 2014 sudah optimal.

Begitupula hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris dan Kasubag yang ada di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sigi dapat dikatakan bahwa produktifitas KPU Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pileg 2014 sudah optimal terlaksana, ini dapat dilihat dari pendapat mereka berkaitan dengan Modalitas yang dimiliki sudah menopang kegiatan dalam Pileg 2014, begitu juga tenaga yang dimiliki sudah mencakup keseluruhan proses yang ada dalam pileg, begitu juga logistik yang secara keseluruhan terpenuhi di setiap TPS, dengan demikian secara keseluruhan tahapan yang ada dalam pileg 2014 sudah teralaksana dengan baik dengan terpilihnya anggota Legislatif tahun 2014.

Informasi lainnya dari Panwas Kabupaten Sigi saat Pileg 2014 dan masyarakat, maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan Pileg tahun 2014

berkaitan dengan produktifitas belum optimal ini dikarenakan walaupun secara tahapan pileg 2014 telah terlaksana dengan baik namun masih ada beberapa hal yang bermasalah seperti masih adanya masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT, dan masih ada nya masyarakat yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

Dari data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2014, menggambarkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi pada tahun 2014 didukung anggaran kurang lebih Rp. 1.530.697.000 dan dalam penyelenggaraan pileg tahun 2014 KPU Kabupaten Sigi dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 75 orang yang tersebar sebanyak 5 orang setiap kecamatan serta 533 TPS yang tersebar pada 156 Desa/Kelurahan yang mana setiap desa/terdapat PPS dan setiap TPS terdapat KPPS.

Melihat hasil wawancara seluruh informan yang ada serta gambaran anggaran dan tenaga pendukung KPU Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan pileg tahun 2014, maka peneliti menyimpulkan bahwa Produktifitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014 dapat dikatakan sudah optimal. Ini dilihat dari ketersediaan modal/anggaran, tenaga kerja, dan logistik dalam penyelenggaraan pileg tahun 2014 sudah memadai sesuai dengan yang di butuhkan oleh KPU kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pileg tahun 2014.

Sehubungan dengan itu, Higgins (dalam salusu, 1996:8) menyatakan ada dua kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, kapabilitas organisasi yaitu konsep yang dipakai untuk menunjuk pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor strategik yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif,

yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategik dalam mencapai sasaranya, sedangkan kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasaran.

Dari uraian hasil wawancara dengan seluruh informan penelitian, serta data dan pendapat ahli yang relevan dengan penjelasan tentang produktivitas KPU Kabupaten Sigi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa produktivitas sudah dapat dikatakan berjalan optimal, hal ini sebagaimana dengan kemampuan modal dan tenaga yang mendukung dalam penyelenggaraan Pileg tahun 2014 sehingga dapat berjalan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam PKPU No 6 tahun 2013.

### **Kualitas Layanan**

Kinerja KPU Kabupaten Sigi dalam penyelenggara Pileg Tahun 2014 hanya memiliki sedikit fungsi pelayanan, berkaitan dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pileg tahun 2014, KPU lebih kepada sosialisasi yang dilakukan berdasarkan jadwal dalam tahapan pileg yang telah ditentukan dalam PKPU No 06 Tahun 2013 tentang tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris dan Kasubag yang ada di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sigi dapat dikatakan bahwa Kualitas Layanan KPU Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pileg 2014 dapat dikatakan kurang optimal terlaksana, ini dapat dilihat dengan tahapan yang ada dimana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU lebih kepada melakukan sosialisasi, publikasi, dan pendidikan pemilih. Berkaitan dengan

keluhan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu lebih kepada tugas Panwas. Namun demikian untuk melakukan verifikasi faktual data pemilih KPU melalui petugas lapangan turun langsung dari rumah ke rumah untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran data pemilih.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Panwas Kabupaten Sigi saat Pileg 2014 dan masyarakat, maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan Pileg tahun 2014 berkaitan dengan Kualitas layanan belum optimal terlaksana ini dikarenakan masih adanya masyarakat wajib pilih tidak berpartisipasi dalam Pileg tahun 2014 dikarenakan tidak mendapatkan kartu panggilan untuk memilih serta masih adanya warga yang lebih memilih tidak menyalurkan hak suaranya.

Data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2014, berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pileg tahun 2014, partisipasi masyarakat Kabupaten Sigi pada Pileg tahun 2014 mencapai kurang lebih 75,75% atau berjumlah 130.377 jiwa dari total keseluruhan Data Pemilih Kabupaten Sigi yaitu berjumlah 172.118 Jiwa. Begitu juga masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya mencapai kurang lebih 24,25% atau berjumlah 41.741 Jiwa dari total keseluruhan Data Pemilih Kabupaten Sigi yaitu berjumlah 172.118 Jiwa.

Selanjutnya Thoha (1995:181) menjelaskan bahwa “ kualitas layanan sangat tergantung pada bagaimana pelayanan itu diberikan oleh orang dan sistem yang dipakai dalam organisasi”. Artinya aktivitas organisasi adalah aktivitas orang-orang, sedangkan orang atau manusia adalah unsur utama dalam setiap organisasi.

Dari uraian hasil wawancara dengan seluruh informan penelitian, serta data yang diperoleh dari Kpu Kabupaten Sigi dan pendapat ahli yang relevan dengan penjelasan tentang Kualitas layanan KPU

Kabupaten Sigi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kualitas Layanan dapat dikatakan belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak suaranya KPU Kabupaten Sigi lebih kepada penggunaan media baliho dan spanduk, dan minimnya sosialisai langsung kepada wajib pilih, yang mengakibatkan masih adanya masyarakat wajib pilih yang tidak menggunakan hak suaranya, baik itu yang tidak terdaftar dalam DPT maupun yang tidak memberikan hak suaranya pada Pileg Tahun 2014.

### **Responsivitas**

Kinerja KPU Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pileg Tahun 2014 secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan petunjuk PKPU yang telah ditetapkan oleh KPU pusat sehingga minimnya upaya KPU Kabupaten Sigi untuk menyusun agenda sendiri untuk kebutuhan masyarakat dalam Pileg tahun 2014.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris dan Kasubag yang ada di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sigi dapat dikatakan bahwa Responsivitas KPU Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pileg 2014 dapat dikatakan kurang optimal terlaksana, karena agenda yang dilaksanakan oleh KPU berdasarkan PKPU yang telah ditetapkan sebelumnya oleh KPU Pusat, sehingga untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat tidak dapat terlaksana dengan baik, karena KPU Kabupaten melaksanakan agenda bukan berdasarkan apa yang diusulkan oleh masyarakat setempat tapi berdasarkan aturan yang ada.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Panwas Kabupaten Sigi saat Pileg 2014 dan masyarakat, maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan Pileg tahun 2014 berkaitan dengan reponsivitas belum optimal terlaksana ini dikarenakan dalam



penyelenggaraan pileg 2014 masyarakat lebih diharapkan untuk melaporkan diri apa bila belum terdata dalam DPT.

Data dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2014, Data Pemilih Sementara (DPS) berjumlah 169.276 Jiwa, yang kemudian setelah mengalami perbaikan, masukan dan tanggapan dari masyarakat menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) berjumlah 166.635 Jiwa, dan setelah di umumkan dan mendapatkan tanggapan serta masukan dari masyarakat diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 165.423 Jiwa.

Lenvine (dalam Ratminto, 2005:174), mengungkapkan bahwa *responsiveness* (responsivitas) adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas merupakan daya tanggap organisasi publik terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya. Birokrasi dalam memberikan pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari kemampuannya dalam mengidentifikasi dan mengakomodir berbagai kepentingan dari berbagai kelompok yang ada di masyarakat.

Dari uraian hasil wawancara dengan seluruh informan penelitian, serta data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Sigi dan pendapat ahli yang relevan dengan penjelasan tentang Responsivitas KPU Kabupaten Sigi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Responsivitas dapat dikatakan belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan dalam penyelenggaraan Pileg Tahun 2014 secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan petunjuk PKPU yang telah ditetapkan oleh KPU pusat sehingga minimnya upaya KPU Kabupaten Sigi untuk menyusun agenda sendiri untuk

kebutuhan masyarakat dalam Pileg tahun 2014, sehingga untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat tidak dapat terlaksana dengan baik, karena KPU Kabupaten melaksanakan agenda bukan berdasarkan apa yang diusulkan oleh masyarakat setempat tapi berdasarkan aturan yang ada, pada kondisi ini masyarakat lebih diharapkan untuk melaporkan diri apa bila belum terdata dalam DPT.

### **Responsibilitas**

Kinerja KPU Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pileg Tahun 2014 secara keseluruhan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan dengan baik dan merujuk pada PKPU No.06 tahun 2013 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah tahun 2014.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris dan Kasubag yang ada di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sigi dapat dikatakan bahwa Responsibilitas KPU Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pileg 2014 dapat dikatakan sudah optimal terlaksana, karena dengan menjalankan tahapan yang ada dalam PKPU maka seperti permasalahan DPT dapat terselesaikan dengan baik, begitu juga dalam pelaksana tahapan-tahapan lainnya sudah berdasarkan aturan yang berlaku.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Panwas Kabupaten Sigi saat Pileg 2014 dan masyarakat, maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan Pileg tahun 2014 berkaitan dengan responsibilitas sudah optimal terlaksana ini dapat diketahui melalui tahapan-tahapan dalam pileg tahun 2014 yang konsisten dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sigi.

Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dilaksanakan merujuk pada Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Lebih lanjut Lenvine (dalam Ratminto, 2005:174), mengatakana bahwa *responsibility* (responsibilitas), merupakan suatu konsep yang menjelaskan persesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik dengan prinsip-prinsip administasi yang benar atau dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Dan dalam fungsi pelayanan publik memerlukan birokrasi yang profesional dengan dipadukan otoritas dan kemampuan diskresi, koordinasi serta responsibilitas.

Dari uraian hasil wawancara dengan seluruh informan penelitian, serta data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Sigi dan pendapat ahli yang relevan dengan penjelasan tentang Responsibilitas KPU Kabupaten Sigi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Responsibilitas dapat dikatakan sudah berjalan optimal, hal ini dikarenakan dalam penyelenggaraan Pileg Tahun 2014 secara keseluruhan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan dengan baik dan merujuk pada PKPU No.06 tahun 2013 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah tahun 2014. Selain itu dengan menjalankan tahapan yang ada dalam PKPU maka permasalahan seperti DPT dapat terselesaikan dengan baik, dengan demikian tahapan-tahapan dalam pileg tahun 2014 yang konsisten dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sigi.

### **Akuntabilitas**

Kinerja KPU Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pileg Tahun 2014 berkaitan

dengan akuntabel sudah sebagai mana mestinya yang di atur oleh organisasi tersebut, sehingga hasil Pileg tahun 2014 merupakan hasil yang diperoleh dari proses tahapan-tahapan yang dilaksanakan secara akuntabel, sehingga mereka yang terpilih dalam Pileg 2014 hasil dari proses yang akuntabel.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Panwas Kabupaten Sigi saat Pileg 2014 dan masyarakat, maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan Pileg tahun 2014 berkaitan dengan akuntabilitas sudah optimal terlaksana ini dapat diketahui dengan tahapan yang transparan serta pemutakhiran data pemilih yang diumumkan kepada masyarakat, serta perhitungan suara yang dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh semua pihak.

Data dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPD RI hasil pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Sigi, pada urutan pertama di ditempati oleh Shaleh Muhamad Aldjufri, Lc.MA dengan jumlah suara 14.134, urutan kedua ditempati oleh Hj. Nurmawati Dewi Bantilan, SE dengan jumlah perolehan suara 12.216, urutan ketiga ditempati oleh Ahmad Syaiful Malonda, SP dengan perolehan suara 11.705, urutan keempat ditempati oleh Drs. Landri Tandung, M.Pd dengan perolehan suara 8.348, dan urutan kelima ditempati oleh M. Ridha Saleh dengan perolehan suara 7.224.

Perolehan suara calon anggota DPR RI hasil pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Sigi, perolehan suara terbanyak urutan pertama yaitu H.Muhidin Mohamad Said (partai Golkar), jumlah suara sebanyak 15.050, urutan kedua Ir.H.Syafrun Abdullah (PDI Perjuangan), jumlah suara sebanyak 12.476, urutan ketiga Christanty Natalia (Partai Nasdem), jumlah perolehan suara sebanyak 4.874, urutan keempat dr.Verna Gladies Merry Ingkriwan (Partai Demokrat), jumlah suara sebanyak 4.325, urutan kelima Supratman Andi Agtas,SH.MH (Partai

Gerindra), jumlah suara sebanyak 4.195, dan urutan keenam Akbar Zulfakar.ST (PKS), jumlah suara sebanyak 3.842.

Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah hasil pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Sigi, perolehan suara terbanyak urutan pertama yaitu Prof.Drs.H.Aminuddin Ponulele, M.Si (Partai Golkar), jumlah suara 8.660, urutan kedua Drs. Ridwan Yalidjama (Partai Golkar), jumlah suara 5.997, urutan ketiga Nurmiati G.Dg Pasau, S.Pd, M.Si (Partai Gerindra), jumlah suara 5.918, urutan keempat Sakinah Aljufri, S.Ag (PKS), jumlah suara sebanyak 3.844, urutan kelima Ir.Lukman Us Heba (Partai Gerindra), jumlah suara 3.800, urutan keenam Yohanis Marampa.ST (Partai Nasdem), jumlah suara 3.281, urutan ketujuh Muharam Nurdin (PDI Perjuangan), jumlah suara 2.683, dan urutan kedelapan Amran Ismaun (PKPI), jumlah suara 2.209.

Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sigi, menggambarkan bahwa perolehan kursi pada Pileg tahun 2014 Kabupaten Sigi di dominasi oleh Partai PDI Perjuangan dan Partai Golkar dengan perolehan masing-masing sebanyak 5 kursi, kemudian Partai Nasdem, Partai Gerindra, dan Partai Hanura dengan perolehan masing-masing sebanyak 4 Kursi, kemudian PKB, Partai Demokrat, dan PKPI dengan perolehan masing-masing 2 kursi, kemudian PAN dan PBB dengan perolehan masing-masing 1 Kursi.

Lenvine (dalam Ratminto, 2005:174), menegaskan bahwa *accountability* (akuntabilitas) merujuk pada pertanggungjawaban eksternal organisasi, yaitu apakah kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk kepada para *stakeholder*-nya. Ini mengartikan bahwa akuntabilitas harus dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawaban.

Dari uraian hasil wawancara dengan seluruh informan penelitian, serta data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Sigi dan

pendapat ahli yang relevan dengan penjelasan tentang Akuntabilitas KPU Kabupaten Sigi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Akuntabilitas dapat dikatakan sudah berjalan optimal, hal ini dikarenakan hasil Pileg tahun 2014 merupakan hasil yang diperoleh dari proses tahapan-tahapan yang dilaksanakan secara akuntabel, sehingga mereka yang terpilih dalam Pileg 2014 hasil dari proses yang akuntabel, serta tahapan yang berjalan sebagai mestinya dan menjaga independensi penyelenggara adalah bentuk tanggung jawab dari penyelenggara, begitu juga dengan tahapan yang transparan serta pemutakhiran data pemilih yang diumumkan kepada masyarakat, serta perhitungan suara yang dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh semua pihak.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014, Jika di lihat dari unsur Produktifitas sudah optimal terlaksana, unsur Responsibilitas sudah optimal terlaksana, unsur Akuntabilitas sudah optimal terlaksana. Sedangkan Unsur yang belum optimal adalah Kualitas Layanan dan unsur Responsivitas

Dari kesimpulan yang ada penulis merekomendasikan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Kualitas layanan, KPU Kabupaten Sigi perlu melakukan koordinasi dengan Adhock yang ada dibawahnya yaitu PPK dan PPS untuk lebih proaktif dalam memberikan sosialisasi dan melakukan Coklit sehingga masyarakat merasa terlayani dan dapat berpartisipasi dalam Pemilu.
2. Berkaitan dengan responsivitas, KPU Kabupaten Sigi perlu menekankan kepada jajaran adhock yang ada di bawah KPU

Kabupaten Sigi yaitu PPK dan PPS untuk lebih intensif melakukan Koordinasi dengan pemerintah Desa dan Kecamatan setempat sehingga masyarakat dapat terwakili dalam menyampaikan permasalahan dalam Pemilu.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih setulus hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan artikel ini, terkhususnya kepada yang terhormat Dr. Irwan Waris, M.Si, ketua tim pembimbing, Dr. Muh. Nawawi, M.Si anggota tim pembimbing, yang telah membimbing, dan mengarahkan penulis sehingga penulis menyelesaikan artikel ini.

### DAFTAR RUJUKAN

- Dwiyanto, Agus. 2002, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, Cet.Pertama, Yogyakarta:Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
- Miless, Mathew B. Dan Michael, A. Haberman, 1994. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press, Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 2008, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 06 Tahun 2013 tentang tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Ratminto, Atik Septi Winarsih, 2005, *Manajemen Pelayanan*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rivai, Veithzal. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Publik*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatis Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftha 1999, *Desakralisasi Birokrasi Publik, dalam Menyoal Birokrasi Publik*, Jakarta: Balai Pustaka
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *tentang penyelenggaraan pemilihan umum*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012, *tentang Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota*